

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul dan atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis dan Organisasi masyarakat menciptakan serta menggunakan informasi Supaya Dapat Terhubung dengan Lingkungan Dan juga orang Lain komunikasi ini dilakukan secara Lisan yang Dapat mempengaruhi antarah sesama makhluk ciptaan Tuhan baik dengan symbol. Simbol maupun perilaku dan tindakan dalam pengertian dan kampung ini tidak Lepas Dengan komunikasi antara satu dengan yang lain untuk melakukan komunikasi yuga memiliki berbagai cara supaya Lawan atau teman berbica dapat menyambung dan memahami apa yang di sampaikan. dalam mempergunakan cara. cara berkomunikasi yang biasa Dilakukan seseorang dalam bentuk Lisan (variable) tetapi tidak ada yang bisa Dipahami atau dimengerti oleh kedua belah pihak maka dapat dilakukan secara Gerak-Gerik (dapat dipergunakan bahasa tubuh) yang berarti memakai bahasa

noverbal. Komunikasi dapat disimpulkan bahwa secara sederhana komunikasi bisa terjadi apabila memiliki kesamaan Di antara Penyampaian dan yang menerima komunikasi terhadap masyarakat tersebut mengenai evaluasi dana kampung dan Juga merupakan hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia dimana manusia itu merupakan Individu maupun sebagai makhluk hidup atau makhluk social hal ini dapat terlihat dalam kehidupan berorganisasi untuk mendapatkan wadah keterampilan terhadap banyak orang karena karena tidak ada satu pun organisasi yang dapat terbentuk tanpa menggunakan komunikasi tentu tergantung pada kemampuan kita dalam memahami satu dengan lainnya sebab itu evaluasi ini sangat mendalam dan penting di dalam evaluasi tentu memiliki karakter atau di salah satu kegiatan apapun untuk memberi daya dan kepercayaan bagi waktu dan perbuatan karena bentuk evaluasi dan kemampuan manusia dapat berbagai pengetahuan dan pengalaman sehingga melalui komunikasi terhadap seorang atau sekelompok orang dapat dipahami Namun evaluasi baru dapat efektif melalui komunikasi apabila pesan atau perkataan yang dapat disampaikan dapat ditafsirkan oleh penerima atau pendengar model pola strategi ini penggunaan dana kampung tentu memiliki peranan penting untuk menyampaikan tujuan. Dana kampung yang Dialokasikan Dalam (APBN) yang Diperuntukan bagi masyarakat kampung dengan mentransfer melalui anggaran Pendapatan Dan pembelanjaan Daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan ke masyarakatan dan pemberdayaan

masyarakat tentu memiliki kaidah erat dengan komunikasi angkota atau pesertanya merupakan suatu organisasi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat kampung dalam penggunaan dana kampung merupakan tindak Lanjut Dari arahan peresiden RI mengenai tata cara penghitungan perincian Dana kampung yang setiap kampung di atur dengan peraturan menteri Keuangan sehingga pengelolaan Dana kampung yang harus dimiliki oleh aparat kampung yaitu tahap perencanaan sampai pada tahap pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan secara transparan akuntabilitas partisipatif, dan disiplin anggaran permenkeu 205/ pmk 07/2019) tentu harus disampaikan kepada Masyarakat dengan komunikasi yang efektif, ini bukan saja hanya tersampainya sebuah tujuan Visi dan Misi yang terkandung dalam proses dalam pengelolaan anggaran Dana kampung tetapi untuk menjalin hubungan yang harmonis, dinamis, pasti sesama masyarakat kampung dalam pengelolaan Dana kampung menjadi direktur pelaksana fungsi ditetapkan sebagai kordinator KPA penyaluran Dana sebagai alokasi khusus (DAK) Dana kampung merupakan direktorat jenderal. Atau pembagian Dana Kampung disesuaikan dengan kinerja terbaik dalam arti kampung untuk memiliki hasil penilaian terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Dana kampung pencapaian pembangunan dalam pengelolaan keuangan kampung Sehingga pencapaian Dana untuk mengelolah seluruh elemen atau kegiatan apapun model polah strategi komunikasi sangatlah penting karena tanpa komunikasi segala sesuatu yang telah direncanakan ingin dicapai dan dilakukan tidak bisa berjalan dengan semestinya maka Dari

itu saya tertarik untuk melihat bagaimana para aparat kampung mempergunakan komunikasi yang mempergunakan hal Dasar dalam melaksanakan masyarakat Dari kemiskinan sehingga Dapat tercipta dan keharmonisan serta ke lajukan hidupnkampung merupakan salah satu Faktor utama adalah mewujudkan atau melindungi masyarakat tersebut maka anak. anak desa itu seklah dan menjadi pintar untuk meruba dunia pendidikan kalo desa tdk melindungi maka anak. anak tdk bisa pintar dan tdk sekolah karna apa, ekonomi orang tua tdk mampu untuk membiayainya. pendidikan itu membutuhkan karakter dan wawasan luas maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan itu akan sangat bergantung pada kesiapan desa dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel serta mendapatkan partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Pembangunan daerah dan pembangunan desa yang merupakan bagian daripembangunan nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan sumberdaya ekonominya sendiri secara efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya didukung Peraturan semua Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sebuah titik awal bagi desa untuk menunjukan peran dan kemampuannya untuk ikut membangun pemerintahan Indonesia Pemerintah

desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan desa dan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang jauh lebih luas. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, kebutuhan masyarakat, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan Sejalan dengan visi Pemerintah untuk “Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka NKRI”, dialokasikan dana yang lebih besar pada APBN-P 2015 untuk memperkuat pembangunan desa. Pengalokasian Dana kampung dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Dana ini bersumber dari (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Terkait dengan penggunaan Dana kampung yang porsinya lebih besar kearah pembangunan fisik menjadi sebuah pertanyaan besar mengenai apakah pembangunan fisik yang mendapat porsi lebih besar dari penggunaan dana kampung tersebut akan mampu menjawab persoalan kesejahteraan serta

pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan? Ataukah besarnya anggaran dana desa yang didapatkan hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu dan para pemegang kekuasaan di desa? Berdasarkan latar belakang tersebut yang penulis uraikan sehingga penulis tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana efektifitas pengelolaan Dana kampung untuk kepentingan pembangunan fisik desa. di Kampung Omtamur.

B. Perumusan Masalah

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan Pemaparan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah adalah:

- a. Bagaimana evaluasi penggunaan dana desa Kampung Omtamur Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang?
- b. Apa saja factor pendukung dan penghambat dalam penggunaan dana desa Kampung Omtamur Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang?

2. Pembatasan Masalah

- a. Pembatasan masalah dibatasi pada evaluasi dan kebijakan dalam penggunaan dana kampung terhadap persoalan yang ada di Kampung Omtamur Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang disimpulkan dari latar belakang masalah diatas yang menjadi tujuan penelitian berupa:

- a. Untuk mengetahui evaluasi penggunaan dana desa Kampung Omtamur Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan dana desa Kampung Omtamur Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat ini yang Diharapkan hasil Dari penelitian dalam penggunaan Dana kampung untuk meningkatkan pendapatan keuangan dan penulis lakukan sebagai berikut

- a. Dengan adanya hasil penelitian tentang evaluasi penggunaan Dana Desa distrik Nongme Kampung Omtamur. Kabupaten Pegunungan Bintang maka hasill penelitian nanti akan Diharapkan agar memberikan sumbangan kepada partisipasi untuk mendapatkan keluarga di Kampung Omtamur.
- b. Dalam hasil penelitian ini meneliti diharapkan bahwa dengan hasilnya dapat menjadi suatu motivasi dan dorongan untuk bagi para aparat kampung untuk memaknai kapenggunaan Dana desa ADD/DD.

Dalam mengelola Dana kampung Efektif dan Efisien guna untuk memberdaya masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Melakukan penelitian dengan judul.Evaluasi penggunaan Dana Desa Pada Kampung Omtamur dstrik npngme Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2022.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Penggunaan dana desa pada kampung Omtamur tahun 2021-2022
- b. Hambatan yang dihadapi dalam merealisasi alokasi dana desa pada Kampung Omtamur
- c. Cara menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa pada Kampung Omtamur Jenis penelitian ini adalah kualitatif.

Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan wawancara.Analisis data menggunakan teknik efektivitas dan rasio kreteria efektivitas.Hasil penelitian menunjukkannya evaluasi penggunaan dana desa dari tahun 2021-2022 sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas dana desa pada Kampung Omtamur yaitu tahun 2021 (5%), 2022(5%), Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Kampung Omtamur adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, miss komunikasi, dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat dalam merealisasi alokasidana kampung dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan melakukan penelitian dengan judul evaluasi penggunaan dana

desa Kampung Omtamur Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang Hasil dari penelitian ini bahwa kualitatif dana pembangunan fisik Desa omtamur Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang dikatakan karena target dan realisasi dana yang sudah ditentukan tidak mengalami pengembangan, akan tetapi tidak efisien karena tidak memenuhi kualitas daya guna pembangunan fisik tersebut. melakukan penelitian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Hasil ini menunjukkan rasio efisiensi keuangan desa rata-rata sebesar 3,12% dengan kategori tidak efisien tahun 2021-2022. Rasio desa keuangan rata-rata sebesar 3,56% dengan kecenderungan menjadi sangat efektif. Efisiensi pengorganisasian melakukan penelitian di Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana kampung dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya. Melakukan penelitian dengan judul Evaluasi penggunaan Dana Desa di Kampung Omtamur Penelitian ini difokuskan pada penerapan sistem pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana yaitu sebuah desa di Kampung Omtamur Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mengetahui bagaimana penerapan sistem pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Kampung Omtamur Distrik Nongme mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemkab Pegunungan Bintang lebih khususnya Kampung Omtamur dalam upaya

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana untuk Penelitian dilakukan di Kampung Omtamur. Sebagai informan dalam penelitian ini tentunya orang-orang yang terlibat langsung dan mengerti dan dapat memberikan informasi tentang pengeunaan dana kampung yaitu Pemerintah kampung sebagai desa pelaksana dan tim pemberdayaan Lembaga Eksekutif tim sebagai kegiatan masyarakat kampung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana kampung sudah menunjukkan bahwa manajemen bertanggung jawab dan transparan. Darisisi pertanggungjawaban baik dalam hal fisik maupun administrasi sudah menunjukkan implementasi yang akuntabel dan transparan. Dan melakukan penelitian Di Kampung Omtamur pemerintahan kampung pada Alokasi Dana Desa (ADD). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah kampung juga mengetahui bahwa sudah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2021. Secara umum akuntabilitas di pemerintahan Kampung Omtamur Madiun sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi.

Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan pengelolaan ADD, yaitu pada tahap pelaksanaan, pelaksanaan program kerja fisik tepatnya kerja jalan menuju dstrik hanya berjalan selama 1 bulan dan selanjutnya program ini tidak berjalan. Namun demikian, sisa dana yang digunakan

untuk membayarkan tenaga kerja yang sedang mengerjakan untuk kegiatan lain tanpa menyertakan bukti penggunaan yaitu kuitansi sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Bupati pengunungan bintang Nomor 8 Tahun 2021 melakukan Penelitian ini bertujuan untuk penggunaan dana di pedesaan dan hubungannya dengan tingkat kemiskinan. Data data time series yang digunakan Statistik Metode yang digunakan adalah kualitatif yang saja gunakan

2. Landasan Teori

Evaluasi kebijakan dikemukakan oleh wiliam Dunn (1998:608-609) merupakan suatu istilah yang saat ini masi menjadi perdebatan definisi yang diberikan cukup berguna, dan dapat dipandang baik secara luas maupun secara sempit, bergantung pihak yang berkepentingan terhadapnya. Derbishire (dalam samudra wibawa, 1994:49)memberikan batasan terhadap policy wacana sebagai sekumpulan rencana kegiatan yangh dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi social dan ekonomi cencana kegiatan tersebut merupakan produk akhir setiap Peraturan Pelaksanaan Undang-Undangnya untuk ditingkat pemerintahan dalam arti merupakan kesepakatan terakhir antara eksekutif dengan wakil rakyat (legislatif).

Kebijakan yang dihasilkan atau direncanakan bertujuan untuk memberikan efek peebaikan terhadap masalah-masalah social dan ekonomi kebijakan yang dihasilkan dan direncanakan merupakan produk kesepakatan antara legislatif dengan eksekutif pembangunan pedesaan

yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, kebutuhan masyarakat, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan visi Pemerintah untuk “Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka NKRI, dialokasikan dana yang lebih besar pada APBN untuk memperkuat pembangunan kampung memberi kewenangan memberi kewenangan dari hasil-hasil keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan public lebih jauh, menawarkan dua buah cara untuk tujuan-tujuan publik untuk memahami suatu kebijakan redaksi suatu kebijakan yang berisi tujuan-tujuan apa yang hendak di capai dari proses pelaksanaan yang memberikan kita hasil maupun dampak dari kebijakan tersebut, baik hasil yang masih bersifat sementara maupun yang sudah final.

(Samodra Wibawa, 1999:49). Kebijakan menjadi hasil-hasil keputusan dan tujuan-tujuan publik pelaku yang dimaksud adalah legislatif, eksekutif, dan siapapun yang hasil keputusannya untuk kepentingan orang banyak atau masyarakat selanjutnya pengertian yang dikemukakan dan memahami kebijakan dari sisi substansi dari proses pelaksanaan kebijakan substansi kebijakan yaitu. Rumusan-rumusan kebijakan yang telah diputuskan dalam tujuan-tujuan yang akan dicapai kebijakan publik adalah pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan dari legislatif, pernyataan/pengaturan yang dilakukan oleh eksekutif penggunaan anggaran dan juga kegiatan apapun yang dilakukan oleh siapapun yang menjadi masyarakat sebagai sasarannya, kebijakan sebagai

suatu sistem yang memiliki tiga buah komponen yang berinteraksi secara timbal balik tiga komponen tersebut yaitu pelaku kebijakan lingkungan kebijakan publik sendiri ketiga komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain komponen-komponen itu dapat dijelaskan secara baik yaitu:

- a. Pelaku kebijakan yakni badan pemerintahan maupun org atau lembaga non-pemerintah yang terlibat dalam pembuatan mereka dapat mempengaruhi dan sekaligus terkena pengaruh dari suatu kebijakan.
- b. Lingkungan kebijakan yang dimaksud dengan lingkungan bukannya org-orang atau lembaga yang berada di sekitar dan mempengaruhi pemerintahan selaku penentu akhir suatu kebijakan penentu mereka ini (mereka ini semua termasuk dalam kelompok pelaku atau actor kebijakan) melainkan lebih menunjukkan kepada bidang-bidang kehidupan masyarakat yang dapat atau perlu dipengaruhi oleh pelaku kebijakan
- c. Kebijakan publik yaitu serangkaian pilihan tindakan pemerintahan untuk menjawab tantangan (memecahkan masalah) kehidupannya masyarakat.

Dikutip oleh (Budi Winarno 2004: 19). memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau

merealisasikan suatu sarana dan perasarana atau suatu maksud tertentu, devinisi yang dikemukakan ini dikemukakan oleh pada tindakan atau usulan oleh stakeholder kebijakan usulan tersebut dapat menjadi hambatan dan kesempatan dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut, batasan-batasan kebijakan yang dikemukakan oleh banyak pihak pada dasarnya menekankan pada apa yang dilakukan oleh pelaku kebijakan keterlibatan actor-aktor tersebut dalam penelitian evaluasinya dilihat dari sudut substansinya yaitu memahami kebijakan berdasarkan rumusan-rumusan redaksi suatu kebijakan yang berisi tujuan-tujuan yang hendak dicapai yaitu hasil keputusan yang telah ditetapkan oleh pelaku kebijakan.

Evaluasi kebijakan menekankan pada apa yang dilakukan actor kebijakan dan sifat kebijakan publik tersebut sebagai arah tindakan dapat memahami menjadi beberapa kategori seperti tuntutan kebijakan.

- a. Tuntutan-tuntutan kebijakan adalah yang dibuat actor-aktor swasta atau pemerintah, ditunjukkan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Tuntutan tersebut berupa desakan agar pejabat pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengenai masyarakat dan mungkin secara umum bahwa pemerintah harus menjawab sesuai permintaan masyarakat tersebut oleh sebab tindakan yang seperti biasanya masyarakat bertempat tindakan yang dapat dipahaminya
- b. Evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn diatas menginformasikan bahwa evaluasi kebijakan tidak sekedar mengumpulkan dan informasi mengenai kebijakan yang dapat

diantisipasi dan yang tidak dapat diantisipasi tetapi evaluasi diarahkan untuk memberi informasi pada masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Selain itu evaluasi kebijakan diarahkan untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah bagi semua individu, kelompok dan masyarakat apabila adanya aksi-aksi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut diatas maka dari itu dari berbagai teori diatas dipilih teori wiliam Dunn dikarenakan yang paling tepat dalam hal mengevaluasi pelaksanaan kegiatan istimewanya

a. Pengertian Peran Dalam Teori Terhadap Masyarakatnya

Peran merupakan aspek dinamika kedudukan (status) apabila seorang administrasi. Hak dan kewajiban menurut Soerjono Soekanto (1986:903) yaitu sesuai dengan tugas dan kewenangan. Maka menjalankan suatu peranan pemerintahan maupun instansi lain. Menerima pada akhirnya, kegiatan peran terhadap kewenangan keseluruhan perencanaan taktik dan cara yang dipergunakan untuk melancarkan komunikasi dengan peran terhadap masyarakat setempat dalam rangka menyusun strategi diperlukan dengan suatu pemikiran dengan memperhitungkan faktor faktor pendukung dan penghambat adalah proses penjangkauan suatu pesan dalam bentuk simbol atau kode dari satu pihak kepada yang lain dengan efek untuk mengubah sifat. Administrasi adalah salah satu organisasi terjadi dalam bersifat formal dan informal, dan berlangsung dalam kepemimpinan peran

dalam masyarakat setempat komunikasi untuk menjalankan bersifat tentang kelompok organisasi juga. Peran organisasi berfungsi untuk membentuk aturan atau pedoman dalam berfikir dan bertindak dalam mencapai tujuan yang ditetapkan hal ini berarti budaya organisasi yang tumbuh dan terpelihara dengan baik akan mampu memacu organisasi ke arah yang lebih baik tujuan organisasi menentukan Fokus beberapa tujuan organisasi peran dalam kepemimpinan baik antara lain yaitu. Diberi jalan masuk untuk menuju organisasi tersebut yang merupakan bagian dari keadaan percaya dan Rasa aman dan nyaman Menolong orang lain memberikan nasehat kepada orang Lain dalam mencapai tujuan mengarah ke lebih baik untuk peran dalam organisasi manapun. Menyelesaikan masalah dan membuat keputusan karena dalam peran organisasi semakin tinggi kedudukan atau status seorang maka semakin penting meminta orang lain untuk keahlian teknik Sehingga dalam penyelesaian masalah atau membuat keputusan tersebut harus ada komunikasi melalui organisasi sebagai bahan pertimbangan. Mengevaluasi perilaku secara efektif yaitu suatu penilaian untuk mengetahui hal-hal yang akan mereka lakukan setelah menerimanya

b. Pentingnya Implementasi Kebijakan

Evaluasi merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan maka dalam hal ini erat kaitannya dengan bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut dalam kamus

wabester secara implelementasi kebijakan dan dirumuskan: (to implement mengimplemntasikan) berarti menimbulkan dampak akibat terhadap sesuatu kalau pandangan itu diikuti maka evaluasi dapat di pandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan pembangunan dapat dimulai pada dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sarana sara negara perincian tujuan dari suatu kebijakan yang telah disebutkan diatas sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implelementasinya.

Cleaves (dalam wahab, 1997:125) menyatakan bahwa implelementasi dapat di evaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan/ mengoperasionalkan program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya keseluruhan proses implelementasi kebijakan dapat dievaluasikan dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil hakhir dari program tersebut dengan tujuan kebijakan

c. Evaluasi kebijakan

Menurut subarsono (2005:119) Evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan leo agustino dalam bukunya jang berjudul dasar-dasar kebijakan bahwah evaluasi ditunjukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apaka kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang dinginkan (dalam Leo, 2006:186). wiliam N. Dunn, memberikan arti pada istilah

evaluasi bahwa melihat sebagian sebagian kegagalan dalam secara umum istilah evaluasi dapat disarankan dengan penaksiran pemberian angka dan penilaian kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti yang lebih spesifik evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan,, Dunn, 2003:608).

Pengertian diatas menyalakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan dimana bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan.

Menurut lester dan stewart yang dikutip oleh elo agustino dalam bukunya berjudul dasar-dasar kebijakan publik bahwa evaluasi ditunjukkan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan jadi evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan.

Sudarman denim mendefinisikan penilaian evaluasi sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut yaitu:

1. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi

2. Bahwa penelaian itu adalah suatu proses yang berarti yang berarti bahwa penelaian merupakan kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen.
3. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dicapainya.

Kriteria Evaluasi

Menurut William Dunn, Efektivitas kebijakan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan kecukupan terhadap kebutuhan; pemerataan dalam pelaksanaan kebijakan; Responsivitas ketepatan program

a) Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian William Dunn dalam judulnya yang berjudul pengantar analisis kebijakan edisi kedua menyatakan bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil akibat yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selagi diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter (Dunn, 2003:429).

b) Efisiensi

Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. William N. Dunn berpendapat bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat Efektivitas tertentu

efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau lajanan kebijakan akan mencapai dengan biaya terkecil dinamakan efisien'' (Dunn 2003:430)

c) Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William Dunn menemukan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas mengukur atau memperkirakan seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan nilai dan norma atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

d) Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik William Dunn mengatakan bahwa kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan social dan menunjukan pada distribusi akibat dan usaha

antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434).

Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usah secara adil distribusikan suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata kunci dari pemerataan yaitu, keadilan atau kewajiban.

e) Responsibilitas

Responsibilitas dalam kebijakan publik berarti tangkapan sasaran kebijakan publik atas penerapan atau kebijakan menurut Dunn berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437).

Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tangkapan masyarakat atas pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan tangkapan masyarakat setelah dampak kebijakan suatu mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan atau pun wujud yang negatif berupa dan penolakan Dunn pun menemukan bahwa kriteria Responsibilitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan dan kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang

semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan(Dunn, 2003:437)

3. Konsep Kepemimpinan

- a. Kepemimpinan adalah merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan bahkan sepanjang kehidupan manusia senantiasa diadapkan dan berkelut dengan konflik demikian halnya Dengan kehidupan organisasi anggota senantiasa diadapkan pada konflik perubahan atau inovasi baru sangat rentan menimbulkan konflik (destruktif) apalagi jika tidak Disertai pemahaman untuk meruba pemimpin yang terhormat dalm waktu politik ah wajar terjadinya dalam organisasi karena tanpa diciptkan sesuatu mesti terjadi dalam organisasi.
- b. Dalam kehidupan berorganisasi antara pemempin dengan orang yang dipimpinnya Atau antara anggota kelompokdengan anggota lainnya bisa saya terjadi oleh karena itu mengendalikan salah satu tugas pemimpin dalam kepempinananya.

Evektivitas kepemimpinan Seorang dapat di nilai dari bagaimana itu mampu mengendalikan dan mengelola organisasi politik dalam kepemimpinan itu sendiri merupakan salah satu pelik yang harus segera Dicarikan pemecahannya oleh sebab itu selain itu juga dapat bermanfaat bagi rakyatnya terutama dalam kepemimpinan yaitu:

- a. Menciptakan kreativitas,
- b. Perubahan social yang konstruktif

- c. Membangun keterpaduan kelompok dan kepemimpinan
- d. Peningkatan fungsi kekeluargaan kebersamaan Pemimpin organisasi harus bisa mengambil sikap dengan cepat karena jika tidak segera diatasi akan menyebabkan tersendatnya pertumbuhan organisasi itu sendiri untuk menangani konflik di Daerah penguasaan karena semua berdasarkan dengan pemimpin. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor organisasi desa seperti ini dibutuhkan untuk membangun akses pendidikan atau pembangunan yang mendalam-dalamnya di kawasan pedalaman seperti daerah-daerah pedalaman. Rakyat Papua yang berhasil mendapatkan pemimpin yang layak untuk harus kembali ke kampung halamannya dan berbagi pengetahuan mereka ke masyarakat setempat. Desa merupakan salah satu faktor utama adalah mewujudkan atau melindungi masyarakat tersebut maka anak-anak desa itu sekolah dan menjadi pintar untuk merubah dunia pendidikan kalau desa tidak melindungi maka anak-anak tidak bisa pintar dan karena pedalaman belum ada mewujudkan pembangunan gedung sekolah

a) Langkah-Langkah strategi Pemimpin kepala kampung terhadap masyarakat

Menjelaskan akibat kemudahan dioperasikan strategi merupakan paduan dari perencanaan kepemimpinan untuk mencapai suatu tujuan dilakukan dalam arti berbeda sewaktu-waktu bergantung dari situasi dan kondisi untuk mencapai hasil kepemimpinan yang positif dan lancar. Menciptakan persamaan kepentingan politik dan

terutama dalam pesan metode untuk mempersamakan kepentingan tersebut maka komunikasi harus mengerti dan memahami polah pikir dan pengalaman lapangan kerja secara tepat dan seksama hal pertama yang harus dimengerti dari khalayak mengenai pokok permasalahan pengetahuan kepemimpinan. Kinerja dalam implementasi kebijakan akan banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Karakteristik badan Pelaksana menunjukkan seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di daerah terpencil itu sendiri oleh karena itu serta harus mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menciptakan komunikasi yang baik antar organisasi terkait. Berangkat dari teori yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam hal ini penulis menghiLangkahn variabel “karakteristik organisasi pelaksana,, karena dalam konteks kebijakan penggunaan dana kampung karakteristik pelaksana kebijakan tersebut sudah jelas, yaitu pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan dana kampung itu sendiri. Selain itu dalam variabel menyebutkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, Penulis menghiLangkahn unsur kondisi politik, karena penulis menilai bahwa pelaksanaan kebijakan penggunaan dana kampung dalam pemberdayaan masyarakat tidak berkaitan dengan masalah politik. Selanjutnya dalam menilai implementasi kebijakan dapat dilihat bagaimana unsur pelaksana mengoptimalkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

Apabila dalam pelaksanaan kebijakan terjadi perubahan sikap dari para pelaksana baik itu menerima maupun tidak akan mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya suatu kebijakan. Terakhir. Dalam pelaksanaannya

4. Konsep Pembangunan

Konsep pembangunan kampung adalah. Seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di wilayah pedesaan meliputi seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Menurut Budiyo, pembangunan kampung diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumberdaya alam mengembangkan kualitas hidup meningkatkan pendapatan bimbingan dari aparat pemerintah kampung dengan bidang tugasnya secara menyeluruh. Konsep pengertian pembangunan kampung menurut UU no. 6 tahun 2014 adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk besar-besaran kesejahteraan masyarakat kampung, pembangunan kampung bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana kampung mengembangkan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, pembangunan kampung meliputi tahap perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. Pembangunan merupakan realisasi dari suatu perencanaan pembangunan di seluruh Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan

pembangunan non fisik. Pembangunan non fisik yaitu pembangunan sekolah, perasarana kesehatan, pasar jalan-jalan kampung, jembatan, balai kampung, dan sebagainya pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan infrastruktur tersebut guna untuk menunjang roda kehidupan masyarakat sehari-hari berjalan lebih lancar, baik menjadikan menjadikan masyarakat lebih sejahtera dengan adanya pembangunan fisik. Membangun kampung menjadi subjek utama fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan perasarana pengembangan potensi ekonomi lokal serta memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Membangun kampung perlu kebersamaan kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan pengurus utama keadilan sosial. Memberi kampung yang cukup lengkap mengenai siklus kampung membangun mulai awal melalui perencanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pelaporan dan asil pemanfaatan pembangunan Adapun siklus kampung yang dikemukakan oleh seorang tokoh Sutaryo 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembangunan kampung adalah sesuai dengan kewenangan mengacu pada pembangunan kabupaten/ kota melalui dokumen rencana pembangunan kampung merupakan satu-satunya sebagai dasar menyusun anggaran pembangunan pendapatan dan belanja kampung.

- b. Pelaksanaan pembangunan kampung yang dilaksanakan oleh seorang pemerinta kampung dengan melibatkan seluru potensi masyarakat kampung dalam pelaksanaan pembangunan pemerinta kampung sebagai lembaga msayarakat atau panitia kegiatan pembangunan yang dapat melaksanakan program-program K/L yang masuk ke kampung harus di informasikan kepada pemerintah kampung untuk selanjutnya di interaksikan dalam pelaksanaan pembangunan kampung.
- c. Pemantauan dan pengawasan pembangunan kampung berhak mendapat informasi mengenai rencana pelaksanaan pembangunan kampung melaporkan hasil pemantauan berbagai kelohan terhadap pelaksanaan pembangunan kepada pemerintah kampung
- d. Pelaporan hasil pembangunan dilaporkan kepada kepalah kampung dan BPD yang selanjutnya akan dilaporkan dan di bahas dalam musyawa kampung seluru nasyarakat harus terlibat dalam musyawara kampung harus menangkapi mengenai pelaksanaan untuk bekerja dapat mandiri dan sejahtera tidak boleh di isolasi. kampung dalam kawasan pedesaan merupakan perpaduhan pembangunan antara kampung dalam suatu kabupaten kota sebagai upaya mempercepat meningkatkan kualitas pelajanan pembangunan pemberdayaan masyarakat kampung melalui pendekatan pembangunan partisifatip. Oleh karena itu rancangan pembangunan pemerintah daera provinsi kabupaten kota dan pemerinta kampung. Dana kampung sebagai alat pembangunan pisik di Kampung Omtamur pada hakirnya tahun 2015

kementerian desa daerah tertinggal dan transmigrasi mengeluarkan peraturan menteri desa nomor 21 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana kampung. Peraturan ini menjadi salah satu dasar hukum serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) secara umum prioritas penggunaan dana kampung tetap dilanjutkan pada dua bidang yakni pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung. Selain bidang kewenangan ini seperti alokasi dana kampung (ADD) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), bagi hasil pajak dan restribusi daerah serta pendapatan asli untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di beberapa Daerah maka perlu adanya perlindungan hak-hak dasar

- e. Segala hal menyangkut program wajib terbuka dan harus diketahui semua warga kampung dan bila perlu semua orang keterbukaan maka segala sesuatu yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat kampung mendapatkan informasi secara lengkap dan terus menerus tentang segala hal yang menyangkut program kembangkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan harus mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program meningkatkan saling percaya. Diantaranya sesama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sumber kebijakan dalam hal ini dipengaruhi oleh sumber daya manusia, (SDM) biaya, dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat

diperlukan untuk mencapai keberhasilan atau tujuan dari suatu kebijakan publik Sumber daya manusia penting sebagai penggerak dan pelaksana kebijakan, biaya diperlukan untuk kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan agar tidak terhambat, sertawaktu untuk mencapai tujuannya pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian maka responden harus menggambarkan, mendukung pernyataan untuk digunakan Rancangan dengan masalah dan tiap-tiap pertanyaan akan diberikan skor yang sudah digunakan dalam penelitian ini

5. Pengelolaan Dana Kampung

Sistem pengelolaan dana kampung yang berfungsi pada saat menerima dan disampaikan kepada Masyarakat dengan komunikasi yang efektif, ini bukan saja hanya tersampainya sebuah tujuan Visi dan Misi yang terkandung dalam proses dalam pengelolaan anggaran Dana kampung tetapi untuk menjalin hubungan yang harmonis, dinamis, pasti sesama masyarakat kampung dalam pengelolaan Dana kampung menjadi direktur pelaksana fungsi ditetapkan sebagai kordinator KPA penyaluran Dana sebagai alokasi khusus (DAK) Dana kampung merupakan direktorat jenderal. Atau pembagian Dana Kampung disesuaikan dengan kinerja terbaik dalam arti kampung untuk memiliki hasil penilaian terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Dana kampung pencapaian pembangunan dalam pengelolaan keuangan kampung Sehingga pencapaian Dana untuk mengelolah seluruh elemen atau kegiatan apapun

model polah strategi komunikasih sangatlah penting karena tanpa komunikiasi segala sesuatu yang telah direncanakan ingin dicapai dan dilakukan tidak bisa ber jalan dengan semestinya maka Dari itu saya tertarik untuk melihat bagaimana para aparat kampung mempergunakan komunikasi yang mempergunakan hal Dasar dalam melaksanakan masyarakat Dari kemiskinan sehingga Dapat tercipta dan keharmonisan serta ke lajukan hidupn kampung merupakan salah satu Faktor utama adalah mewujudkan atau melindungi masyarakat tersebu. Aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan visi Pemerintah untuk “Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka NKRI, dialokasikan dana yang lebih besar pada APBN untuk memperkuat pembangunan kampung Pengalokasian Dana kampung dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Dana ini bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana kampung diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan dalam melalui peningkatan pelayanan publik di kmpung memajukan perekonomian kampung mengatasi kesenjangan pembangunan antar kampung serta memperkuat masyarakat kampung sebagai subjek dari

pembangunan. pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Pembangunan daerah dan pembangunan kampung yang merupakan bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dalam hal ini Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sebuah titik awal bagi desa untuk menunjukan peran dan kemampuannya untuk ikut membangun pemerintahan Indonesia dan pemerintah kampung yakni lebih mampu melihat prioritas kebutuhan desa dan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup

6. Definisi Variabel

- a. Devinisi Konsep. Operasional variabel merupakan suatu definisi dan dinyatakan dalam kriteria yang dapat diuji secara khusus. Operasional variabel yang dikemukakan meliputi dalam Evaluasi dana desa
1. Evaluasi dana desa DD adalah penggunaan dana kampung guna untuk Membangun kampung menjadi subjek utama fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung dan kualitas hidup manusia serta penangkulan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan

perasarana pengembangan potensi ekonomi lokal serta memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan Membangun kampung perlu kebersamaan kekeluargaan dan kegontong royongan guna mewujudkan pengurus utama keadilan social. Memberi kampung yang.

b. Devinisi overasional dalam Evaluasi Penggunaan dana Desa operasional Variabel ini dapat dilihat yaitu.

1. Keterbukaan pelaksanaan dana desa Informasi laporan pertanggungjawaban akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban.
2. Akses masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban dana desa. Keterbukaan informasi hasil pelaksanaan dan penggunaan dana kampung itu sendiri Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapainya
3. Laporan rincian penggunaan dana desa Kehadiran tim pelaksana Keterlibatan tim pelaksana dalam penggunaan dana desa

Tercapainya tujuan dana desa Laporan berkala tim pelaksana. Laporan akhir tim pelaksana. Peran pemerintah desa dalam keterbukaan informasi Pelaksanaan prinsip transparansi Pelaksanaan prinsip akuntabilitas Tahap Pertanggungjawaban Pelaksanaan prinsip akuntabilitas Pemerintah desa tidak kesulitan dalam pembuatan laporan Pelaksanaan kegiatan musyawara kampung partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

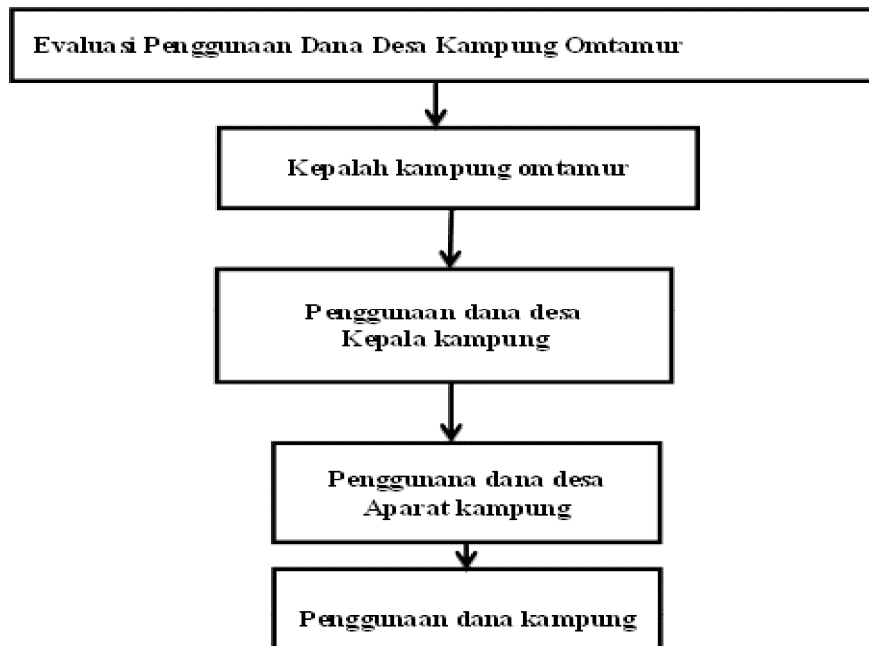
- a) Sumbangan ide dan pemikiran dari masyarakat.
- b) Pengawasan penggunaan dana desa.
- c) Pengawasan pelaporan dana desa

7. Kerangka Konsep

Berikut ini adalah kerangka konsep berpikir pada penelitian di Kampung Omtamur Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang pengunna yang baik oleh pemerintah desa diantaranya dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tercipta keefektifitasan pengelolaan dana kampung yang nantinya akan memberikan gambaran tentang berhasil tidaknya suatu kampung mengelola keuangannya. Desa Balangtanaya merupakan salah satu kampung adalah Kampung Omtamur pada terdiri dari empat dusun yaitu Dusun, diantaranya: Dusun memuk, Dusun ateme 1, Dusun ateme 2, Dusun

domumek, dan Dusun padamnye, geografis desa omtamur (sebelah utara, selatan, barat, dan Timur), Yaitu sebelah utara berbatasan dengan desa rubol dan sebelah selatan pada desa yokom dan sebelah selatan berbatasan dengan desa palur perbatasan dengan dstrik batani sebelah barat berbatasan dengan desa yarigon dan sebelah timur berbatasan dengan desa kemeban dan desa induk di ibu kota nongme Luas desa omtamur adalah 7,2 km² Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didalamnya memuat strategi pembangunan kampung menggunakan anggaran pendapatanbelanja Negara (APBN) yang selanjutnya di kategorikan sebagai Dana kampung. berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul dan atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan itu akan sangat bergantung pada kesiapan desa dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Pembangunan daerah dan pembangunan kampung yang merupakanbagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga

meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan sumberdaya ekonominya sendiri secara efisien untuk organisasi tersebut yaitu,



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian wada untuk mensukseskan penelitianyang akan digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif, merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perlu dapat diamati. (Bogdan dan Taylor Lexy J. Moleong, 1995 Hal 5). Penelitian kualitatif di gunakan untuk skripsi pada kondisi objek yang alamih dimana peneliti adalah sebagai instrument, kunci pengambelan sampel sumber data yang dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) Dan untuk melakukan penelitian

ini maka peneliti harus turut serta terjun ke lokasi penelitian dan membutuhkan waktu yang cukup untuk memperoleh sebuah hasil penelitian yang cukup akurat untuk digunakan pada saat skripsi oleh sebab itu perlu dilaksanakan pada awalnya

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian Di Kampung Omtamur, Distrik Nongme, Kabupaten Pegunungan Bintang.

3. Populasi Sampel

Fokus dalam penelitian ini adalah ada beberapa informasi yang cukup di percaya dapat dicapainya oleh pihak terkait

- a. Penggunaan dana desa DD di Kampung Omtamur Distrik Nongme
- b. Pelaksana pengelolaan keuangan kampung yang selanjutkannya di tingkat ppkd seluruh perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung terdiri di atas maka:
 - a) Sekertaris kampung Kampung Omtamur
 - b) Kaur dan Kasih Kampung Omtamur
 - c) Kaur Keuangan Kampung Omtamur
 - d) Kaur Masyarakat Kampung Kampung Omtamur

4. Teknik Penggumpulan Data

Mengacu pada kerangka tulisan di atas, maka penyusun dalam teknik pengumpulan data menggunakan: Teknik pengumpulan (Ovservasi) Teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan dan mencatat dengan cara sistem terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki atau pun

dalam arti luas pengamatan secara langsung dari Subjek penelitian yaitu pengambilan data dengan melakukan secara sistematis mengenai segala yang di timbul antara wilayah penelitian sesuai penelitian. Observasi memungkinkan penelitian mengamati lebih dekat gejala penelitian dalam untuk penelitian dengan mengambil jarak sebagai pengamat semata-mata atau dapat pula melibatkan diri didalam situasi yang ditelitinya

a. Pedoman Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan komunikasi berlangsung dalam bentuk pedoman tanya jawab dalam hubungan tetap maka, sehingga gerak dan mimik informan merupakan pola media melengkapi kata-kata verbal. Karena itu wawancara tidak hanya menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motivasi, yang dimiliki oleh informan yang bersangkutan

b. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Bungin(2007: 121) adalah metode yang digunakan untuk melurus data-data pada penelitian ini dapat diperoleh melalui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kampung serta beberapa dokumen atau laporan pendukung lainnya Dalam metode dokumentasi ini peneliti datang langsung ke kantor balai kampung di Kampung Omtamur, Distrik Nongme, Kabupaten Pegunungan Bintang untuk mengambil data-data yang berkaitan dengan objek penelitian misalnya penggunaan anggaran dana kampung

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa interaktif data adalah poroses untuk mengatur urutan data mengorganisasikan kedalam satu pola kategori, dan satuan uraian dasar analisis yang diperoleh untuk mengetahui Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian dilakukan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi Langkah selanjutnya adalah menyusun data dalam satuan-satuan. Itu kemudian dikategorisasikan pada Langkahh berikutnya. Pengkategorian itu di laksanakan sambil membuat coding. Tahap terakhir adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data setelah tahap ini selesai maka baru dilakukan penabsiran data Sehingga tahap-tahap dalam analisa data kualitatif meliputi: Pemrosesan satuan data, reduksi pengkategorisasikan data termasuk pemeriksaan keabsahan data, dan penafsiran data terakhir, penelitimenggunakan triangulasi yaitu melalui tiga tahapan pengecekan: Pertama, triangulasi sumber data, yaitu membandingkan data yang diperoleh melalui teknik wawancara dengan data hasil observasi dan survey. Kedua, melakukan peer review untuk mengetahui pendapat para peneliti dan pakar lain yang melakukan peneliti serupa. Ketiga, peneliti akan melakukan triangulasi teori, yaitu membandingkan data empiris dengan kajian teoritis yang telah berkembang dan diakui kebenarannya. Tahapan-tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber data tetap ditelusuri. dalam penelitian dengan judul yang diambil evaluasi penggunaan dana kampung
- b. Mengumpulkan memilih-memilih mengklasifikasikan membuat peneliti dan membuat indeksinya.